NAMA : FARID AKMAL DJAMALUDDIN

KELAS : HTN F

NIM : 10200120229

RESUME HASIL BACAAN MENGENAI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Negara yang telah memilih untuk menjadi Negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilihan umum merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara constitutional¹. Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematic structural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi atau kelompok mereka sendiri². Sementara itu pemilihan umum yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung, cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang tak jujur.

Bangsa Indonesia layak mendapat predikat sebagai bangsa “sejuta pemilu” dikatakan demikian karena peristiwa pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa terus berlangsung tanpa henti³. Dari banyaknya proses pemilihan membuat rakyat semakin terbiasa dan cerdas dalam menentukan pilihannya pada proses pemilihan umum. Hal ini menandakan bahwa rakyat semakin terbuka matanya terhadap proses penyelenggaraannya pemilihan umum. Demokrasi Indonesia memiliki khas dalam hal pembangunan partai politik. Setelah pemilu 2009, spesies partai politik baru yang sebelumnya tidak terwakili dan muncul di demokrasi barat, kemudian berkembang⁴. Untuk memperkuat penemuan-penemuannya, sebuah analisis dinamika partai politik juga dihadirkan. Bagaimana cara partai politik mempertahankan citra mereka di depan rakyat dan pada saat yang sama membentuk pola interaksi mereka di pemerintahan dan parlemen. Partai politik merupakan lembaga public yang harus mempertanggungjawabkan dana public yang digunakannya agar dapat menjadi sarana aspirasi rakyat dalam politik dan pemerintahan⁵. Reformasi pasca politik merupakan perubahan besar dalam system politik di Indonesia, terutama partai

¹ Muhadam Labolo, Teguh ilham.

² Syamsuddin Haris (*Yayasan pustaka obor Indonesia*, 2014).

³ Muhtar Haboddin (*Universitas Brawijaya Press*, 2016).

⁴ M Faishal Aminuddin, Moh Fajar Shodiq Ramadlan (*Jurnal politik 1 (1)*, 39-74, 2015).

⁵ Eka Adhi Wibowo (*Jurnal riset akuntansi dan keuangan 14 (1)*, 31-40, 2018)

politik yang bermunculan. Perubahan prinsip tunggal politik pun yang diberi ruang bagi partai politik kecuali ideology pancasila. Kemudian dengan dibuatnya pemilihan umum langsung daerah pemilihan pada pusat diberi khas tersendiri pada politik. Selain itu, peserta pemilihan umum selain menyebabkan peluang kecil bagi partai politik muncul untuk memperoleh suara mutlak dan hal tersebut akan sulit bagi partai politik untuk merebut kekuasaan.

Seperti biasa setiap akan dilaksanakan pemilihan umum seluruh perhatian, pikiran dan energy elit partai politik yang menjadi peserta pemilu akan gencar melakukan berbagai kegiatan kampanye.

Pada Pemilihan umum tahun 2014 memiliki perbedaan dalam system pemilihannya dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya khususnya dalam memilih anggota legislative. Pada pemilihan umum tahun 2014 sistem pemilihan menggunakan system perolehan suara terbanyak dalam menentukan calon anggota legislative bukan berdasarkan nomor urut tetapi pada perolehan suara terbanyak. Melalui pendekatan metodologi kualitatif dengan analisis kritis dihasilkan kesimpulan bahwa caleg peserta pemilu 2014 menggunakan politik identitas dalam penggunaan simbol-simbol partai seperti warna identitas partai, tokoh partai dan lambang partai⁶.

Perubahan demokrasi Indonesia setelah reformasi telah mengubah bentuk politik Indonesia. Pada masa orde baru, kekuatan politik islam telah mengalami fluktuasi dan dinamika, pada awal orde baru islam terpinggirkan dari Negara⁷. Hal yang menarik dari partai politik Indonesia dominasi partai politik nasionalis disetiap pemilu meskipun kebanyakan rakyat Indonesia beragama islam. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah yaitu, adari atas kebawah dan juga dari bawah ke atas.⁸ Jika terlaksana dengan baik maka fungsi partai politik sebagai partisipasi dan komunikasi politik serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.

Kekuatan media social untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya. Penggunaan media social harus direncanakan, dikomunikasikan dan di program untuk meningkatkan kredibilitas partai, komunikasi organisasi merupakan pertimbangan yang penting untuk memastikan cukup interaksi dalam platform medsos⁹.

Organisasi dan partai harus memahami perlunya memberi perhatian yang cukup

⁶ Edwi Sosiawan (*Jurnal ilmu komunikasi* 13 (3), 234-248, 2015)

⁷ Kiki Mikail (*Tamaddun: Jurnal kebudayaan dan sastra islam* 15 (1), 107-148, 2015)

⁸ Eliya Rosana (*jurnal Tapis: Jurnal teropong aspirasi politik islam* 8 (1), 135-150, 2012).

⁹ Berliana Ardha (*jurnal visi komunikasi* 13 (1), 105-120, 2014).

untuk membangun suatu citra yang menguntungkan. Partai politik merupakan suatu organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang relative sama sedangkan komunikasi politik membahas tentang alokasi sumber daya public, kewenangan formal, yaitu kekuasaan untuk pembuatan hukum yang berkaitan dengan UU dan aturan-aturan dalam lingkup legislative ataupun eksekutif, serta sanksi-sanksi yang akan diberikan¹⁰.

Dalam organisasi politik kita membutuhkan citra positif partai, yang dimaksud yaitu melalui penyikapan terhadap berbagai peristiwa politik dengan membawa aspirasi politik yang sesuai dengan tuntutan public .

Realitas yang berkembang saat ini menunjukkan lemahnya kelembagaan partai pada saat ini, keadaan terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada para kader partai. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya¹¹.

Partisipasi politik dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang abash oleh rakyat. Yang melibatkan mereka dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum dapat juga dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi yang bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif dan berkualitas. Pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan pemerintah, pemilihan umum berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945¹².

Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang factual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislative yang berpihak kepada rakyat.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih orang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Sejak tahun 1955 Indonesia telah menyelenggarakan 11 pemilihan umum, menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan asas kedaulatan rakyat, yang artinya orang yang memegang kekuasaan tertinggi harus diberi kesempatan untuk menentukan kekuasaan¹³.

Pada tahun 2014 Indonesia menjadi tuan rumah pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden yang diadakan pada hari yang berbeda. Sebulan sebelum pemilihan umum dilakukan, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan uji materi undang-undang nomor 42 tahun 2008. Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Khoiruddin Muchtar (*Jurnal ilmu komunikasi* 14 (2), 136-147, 2016).

¹¹ Teguh Imansyah (*Jurnal Rechts Vinding: media pembinaan hukum nasional* 1 (3), 375-395, 2012).

¹² Primandha Sukma Nur Wardhani (*JUPIIS : Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial* 10 (1), 57-62, 2018).

¹³ Nanik Prasetyoningsih (*Jurnal media hukum* 21 (2), 23, 2014).

memutuskan pemilihan legislative dan pemilihan presiden dan wakilnya diadakan bersamaan. Putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUUXI/2013 berimplikasi hukum terhadap pemilu 2014 dan pemilu 2019. Sejak undang-undang baru disahkan, KPU telah melakukan segala persiapan untuk menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia,

tujuan utamanya yaitu mengurangi biaya. Demokrasi Indonesia telah lama dianggap terlalu mahal. Kualitas demokrasi tergantung pada keadilan pemilihan umum bukan biaya.

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sejak bergulirnya era reformasi sampai saat ini selalu mengalami perubahan. Perubahan dengan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan UU partai politik, paket perubahan UU ini juga biasa disebut paket perubahan UU politik, kelemahan pada legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan yang memunculkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya¹⁴.

Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum sejak tahun 1955. Hingga saat ini, rezim hukum pemilu telah melahirkan banyak regulasi dan ketentuan baru, seperti aturan tentang threshold atau ambang batas. Putusan mahkamah konstitusi nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal 208 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislative terkait dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5% tidak berlaku secara nasional¹⁵.

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum presiden, peristiwa ini tentu saja mengakibatkan fluktuasi harga-harga saham mengingat peristiwa politik ini merupakan momen yang penting di suatu Negara. Pengambilan sampel digunakan teknik sampling jenuh, dengan jumlah 21 sampel perusahaan dari perusahaan konstruksi, infrastruktur dan utilitas yang Go Public di BEL, alat analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata¹⁶. Dari hasil itu pun tidak terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pemilu presiden.

MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandate sepenuhnya dari rakyat. 187 bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandate tunggal yang tertinggi, melainkan mandate itu dilaksanakan berdasarkan UUD¹⁷. Dengan demikian, mandate rakyat yang dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan Negara berdasarkan UUD, termasuk oleh MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan Negara.

¹⁴ Marulak Pardede (*Jurnal Rechts Vinding: Media pembinaan hukum nasional* 3 (1), 85-99, 2014)

¹⁵ Sholahuddin Al-Fatih (*Jurnal Yudisial* 12 (1), 17-38, 2019)

¹⁶ Eva Maria Sihotang, Peggy Adeline Mekel (*Jurnal EMBA* 3 (1), 2015).

¹⁷ Khairul Fahmi (*Jurnal Konstitusi* 7 (3), 119-160, 2016)

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari kovenan internasional hak sipil dan politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas pun adalah perihal yang khusus.

Partisipasi perempuan dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum¹⁸.

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dan selalu tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat pemilih hingga pada penyelenggara pemilu. Modifikasi system hukum pemilihan umum harus dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan itu semua harus dimulai dari perubahan UU No. 2 Tahun 2017 tentang partai politik¹⁹.

Kewenangan mahkamah konstitusi pada pasal 24C UUD 1945 hanya menyebutkan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum tidak menyebutkan sengketa hasil pilkada, yang memunculkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian konstitusionalitas kewenangan mahkamah konstitusi menangani sengketa pilkada pada pasal 22E dan pasal 24C UUD. Kewenangan mahkamah konstitusi menangani sengketa hasil sengketa pilkada sebagai pelaksanaan pasal 157 ayat (3) merupakan kewenangan yang bersifat sementara artinya perluasan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi²⁰.

Keberadaan pengadilan partai politik dalam menyelesaikan sengketa partai politik terlihat dari kewenangan pengadilan partai politik dalam mengatur dan memutuskan masalah internal partai politik dengan kekuatan putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal. Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan melalui mahkamah partai politik, apabila penyelesaian melalui mahkamah tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri dan dapat dilanjutkan dengan pengajuan kasasi kepada mahkamah agung²¹.

¹⁸ Rizki Priandi, kholis Roisah (*Jurnal pembangunan hukum Indonesia* 1 (1), 106-116, 2019).

¹⁹ M Iwan Satriawan (*Jurnal Etika dan pemilu* 5 (1), 1-11, 2019).

²⁰ Dian sunardi.

²¹ Kristo Roland Pattipaan (*Jurnal pendidika pancasila dan kewarganegaraan* 5 (1), 85-94, 2020)

Tindak pidana pemilihan umum merupakan suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau bisa juga suatu organisasi yang dengan kesadarannya secara sengaja melakukan pelanggaran hukum, mengacaukan, menghalangi, serta mengganggu pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan menurut UU pemilihan umum yang berlaku.

Perlu diketahui mengenai pengaturan aparatur sipil Negara dalam melaksanakan pemilihan umum dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pertentangan pengaturan netralitas aparatur sipil Negara dalam melaksanakan pemilihan umum Indonesia lebih berpedoman kepada hukum yang berlaku dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana seorang aparatur sipil Negara yang tidak netral dapat dikenakan sanksi pidana²².

Sebuah Negara demokratis sangat membutuhkan adanya partai politik, sebab peran penting dalam proses politik dilembaga legislative, pemerintahan, dan lembaga-lembaga Negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik.

²² Putu risli ananda kusuma, anak agung istri ari atu dewi. (*Kertha wicara: journal ilmu hukum* 8 (1), 1-15